

RINGKASAN

Afifatul Fitria. Optimalisasi Pemanfaatan BMN Hulu Migas Melalui Pemetaan dan Profiling Pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, S.E., M.M.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara, termasuk penataan BMN, piutang, dan lelang. Struktur organisasinya mencakup Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dengan empat Kasubdit, enam belas Kasi, satu Kasubag TU, dan Jabatan Fungsional yang mendukung tugas-tugasnya. Unit-unit ini memiliki peran yang terdefinisi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.010/2021. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Salah satu fungsinya adalah menyiapkan pelaksanaan kebijakan terkait barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Kasubdit I, II, III, dan IV memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangana, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan serta akuntansi barang milik negara.

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) mengelola pemanfaatan BMN Hulu Migas melalui mekanisme sewa dan pinjam pakai, meskipun belum ada kebijakan khusus yang mengatur pengelolaannya. Optimalisasi dilakukan dengan inventarisasi, penilaian aset, serta pengawasan untuk memastikan aset memberi manfaat ekonomi dan lingkungan. Prosedur sewa dan pinjam pakai melibatkan penelitian administratif, penilaian, serta koordinasi dengan pihak terkait. Namun Optimalisasi ini dihadapkan pada tantangan keterbatasan informasi, regulasi, dan tenaga kerja. Solusi yang diimplementasikan meliputi pemetaan, profiling aset, teknologi informasi, pelatihan tenaga kerja, serta kebijakan integratif untuk mendukung pengelolaan yang efisien dan transparan. Strategi ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembangunan sektor energi nasional, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.